

2-28-2016

Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Indonesia

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Penelitian Politik LIPI, wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Growth and Development Commons](#), [Other Political Science Commons](#), and the [Political Economy Commons](#)

Recommended Citation

Jati, Wasisto Raharjo (2016) "Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Indonesia," *Jurnal Politik*: Vol. 1: Iss. 2, Article 6.

DOI: 10.7454/jp.v1i2.1125

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss2/6>

This Book Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

R E S E N S I

Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Indonesia

WASISTO RAHARJO JATI*

Pusat Penelitian Politik LIPI

Email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Van Klinken, Gerry. 2015. *The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang 1930-an – 1908-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV Jakarta. xx + 373 halaman.

Kajian mengenai politik kelas menengah Indonesia selama ini didominasi oleh dua pendekatan utama, yakni Weberian dan Marxian. Perspektif Weberian diawali oleh J.S. Furnivall, Clifford Geertz, termasuk juga Robert W. Hefner. Sedangkan, perspektif Marxian dapat ditemukan dalam karya-karya Richard Robison, Farchan Bulkin, dan Vedi Hadiz. Namun, di luar itu sebenarnya masih ada akademisi lainnya seperti halnya Ariel Heryanto yang lebih melihat kelas menengah dari pendekatan *cultural studies*.

Secara umum, karya-karya tersebut menampilkan pengalaman pembentukan kelas menengah di Indonesia yang berangkat dari masa dekolonisasi yang ditandai dengan munculnya kelompok masyarakat baru dalam struktur masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kelompok masyarakat Indonesia hanya dikenal dalam dua kelompok yakni *raja-kawula* (penguasa-rakyat) yang itu menyimbolkan struktur kekuasaan yang berlandaskan patrimonialisme. Hadirnya kelompok masyarakat baru tersebut kemudian mengisi ruang kosong antara raja dan kawula tersebut yang kemudian berperan sebagai penghubung antara keduanya.

Karakter “antara” (*in between*) yang terdapat dalam karakter kelas menengah Indonesia itulah yang menjadi pintu masuk bagi para ilmuwan dalam melakukan analisis. Namun demikian, karakter “antara” tersebut juga bisa berarti ambigu mengingat ketidakjelasan posisi politik

* Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI.

kelas menengah tersebut. Dikarenakan posisi yang kontradiktif tersebut, kelas menengah Indonesia kemudian dapat dianalisis baik dalam perspektif Weberian maupun Marxian. Kajian Weberian sebagaimana yang dilakukan oleh Clifford Geertz contohnya memperlihatkan bahwa kemunculan kelompok masyarakat baru tersebut merupakan bentuk lain dari pedagang kota kecil (*urban petty buorguises*) yang berkembang seiring dengan pertumbuhan kota tersebut. Sementara itu kajian yang lebih Marxian dari Richard Robison berargumen bahwa hadirnya kelompok masyarakat baru tersebut sebagai wujud dari gelombang kemunculan orang kaya baru (*new richmen/noveau richie*).

Kedua terminologi tersebut di atas memiliki cara pandang yang berbeda satu sama lain dalam melihat kasus politik kelas menengah Indonesia. Pendekatan *urban petty burguises* melihat tumbuhnya kelas menengah merupakan konsekuensi pertumbuhan ekonomi ketika terjadi transformasi kelompok masyarakat feodal menjadi borjuasi. Sedangkan pendekatan *new richmen* lebih melihat kelas menengah sebagai kelas masyarakat baru yang dibentuk oleh negara untuk berperan sebagai pengontrol (*controller*) loyalitas masyarakat melalui jalur birokrasi, militer, maupun juga intelektual. Namun, di antara perbedaan antara keduanya ada hal yang sama yang patut dicermati yaitu kedua pendekatan dominan tersebut secara garis besar menyoroti kemunculan kelas menengah tersebut di kawasan kota metropolitan. Lalu, bagaimana dengan kemunculan kelas menengah yang berada di kawasan kota non-metropolis?

Van Klinken mencoba keluar dari dominasi tersebut dengan berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman politik kelas menengah Indonesia yang selama ini selalu dipusatkan di kawasan metropolitan. Adapun gagasan "*Middle Indonesia*" yang digulirkan dalam buku ini adalah cara pandang alternatif dalam melihat kelas menengah Indonesia dengan melihatnya pada kasus kota-kota provinsi. Hal tersebut sebenarnya juga meneruskan pendekatan awal kelas menengah Indonesia yang berkarakter "antara" (*in-between*) tersebut yang kemudian didalami lebih jauh dalam buku ini. Secara lebih lugas, tampilan kelas menengah yang ditampilkan dalam buku ini secara gamblang memper-

lihatkan juga jalan tengah dalam menjembatani dua mazhab Marxian maupun juga Weberian dalam melihat kelas menengah Indonesia.

Karakter penting kelas menengah yang berkembang dalam kota provinsi adalah mereka menampilkan ciri khas untuk tampil sebagai borjuasi, namun di satu sisi lainnya menampilkan juga sosok pengontrol (*controller*) atas kelas masyarakat lainnya. Adanya bentuk ambiguitas tersebut mencerminkan bahwa kelas menengah yang berkembang dalam kasus kota provinsi adalah kelas masyarakat yang berusaha untuk membuat pembatas atau jarak dengan masyarakat lainnya dan berusaha untuk mengeksklusifkan diri.

Gagasan *Middle Indonesia* untuk menganalisis kelas menengah Indonesia dapat dilihat dalam poin-poin sebagai berikut. Pertama, kelas menengah bukan salah satu ujung antara bipolar pusat-periferi, akan tetapi sebagai pusat mediasi antara sebuah metropolis yang jauh dengan sebuah pedalaman dari segi geografi (hlm. 91). Mediasi sendiri disebut oleh penulis sebagai sebuah proses sosial yang memiliki aspek formal kelembagaan dan informal (hlm. 11). Kedua, kelas menengah memainkan perannya sebagai perantara bagi pemerintah pusat dengan sebagian besar masyarakat (hlm. 7). Ketiga, munculnya kelas menengah merupakan respons dari keinginan untuk mempertahankan perlindungan negara atas diri mereka dari kekuatan kelas kapitalis, maupun juga transformasi kelas bawah (hlm. 20). Dengan melihat ketiga gagasan mendasar tersebut, posisi politik kelas menengah memang berada di tengah-tengah dan memainkan fungsinya sebagai *intermediary agent*. Dengan posisinya itu, tulis van Klinken, mereka tidak akan pernah naik kelas maupun turun kelas, seraya tetap menjadi subordinat kekuasaan negara.

PEMILIHAN KOTA PROVINSI SEBAGAI LOKUS

Titik tekan kota provinsi yang menjadi lokus dalam melihat perkembangan kota kelas menengah ini juga menarik untuk digarisbawahi. Berbeda halnya dengan kota metropolis yang menampilkan sisi kelas menengah Indonesia yang mengarah pada kelas menengah elite, dalam kasus kelas menengah yang berkembang di kota-kota provinsi tersebut,

formasi pembentukan kelas menengah berlangsung secara unik. Keunikan tersebut setidaknya pernah diungkapkan oleh penulis-penulis lain. Pertama, kelas menengah di kota-kota kecil menunjukkan adanya transformasi kelas yang dinamis dari kelas feodal menjadi kelas borjuasi kecil. Kedua, berbeda halnya dengan kelas menengah metropolis yang independen dan egaliter satu sama lainnya dan lebih mementingkan adanya konsumsi sebagai identitas politik, kelas menengah yang berkembang di kota-kota provinsi masih dalam proses membentuk identitas kolektif seperti konsumsi dan gaya hidup, namun masih tetap mempertahankan semangat egalitarian (Pambudy 2012 & Jati 2015). Kelas menengah kota provinsi menunjukkan kecenderungan untuk menjadi *controller* seperti halnya dalam jabatan birokrasi dan militer. Keduanya merupakan cikal bakal adanya *petty bourgeoisie* di kota-kota provinsi (Berenschot 2014). Penulis buku ini sendiri berargumen bahwa kota-kota provinsi memperlihatkan adanya relasi kekuasaan dinamis dikarenakan adanya interaksi masyarakat yang egaliter.

Karakter *controller* yang terdapat dalam kelas menengah ini setidaknya menunjukkan gejala masih kuatnya sikap patrimonialistik dalam masyarakat. Meskipun dikatakan oleh penulis mereka memainkan perannya sebagai perantara, namun birokrasi dan militer juga memainkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi rezim. Adanya rangkap status yang terdapat dalam kasus kelas menengah Indonesia ini sedikit banyak membenarkan temuan Kurosawa (2015) bahwa kelas menengah Indonesia adalah kelas menengah yang semu (*pseudo middle class*). Temuan Klinken dalam kasus kelas menengah yang berkembang di Kota Kupang sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan premis seperti yang telah diungkapkan dalam ketiga tulisan tersebut. Kasus kelas menengah yang berkembang di Kupang tidak bisa menjadi kelas menengah murni (*pure middle class*) seperti yang terjadi dalam pengalaman Barat. Mereka adalah kelompok masyarakat baru yang tampil seolah-olah menjadi kelas menengah melalui status ekonomi maupun identitas kelompok yang diadopsi. Namun, yang membedakan dengan kasus kelas menengah lainnya adalah kelas menengah di Kota Kupang masih memelihara nilai-nilai tradisional maupun juga

modal sosialnya. Hal tersebut cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kasus kelas menengah lainnya yang pada umumnya memiliki sifat independen, rasional, maupun juga pragmatis.

Dalam melakukan analisis terhadap kelas menengah di Kupang, van Klinken merujuk pada temuan-temuan studi yang dihasilkan oleh Aiko, Pambudy, dan lain sebagainya. Berbagai macam premis yang telah disebutkan tersebut kemudian digunakan melihat kasus kemunculan kelas menengah yang berada di Kota Kupang. Kasus kelas menengah yang berkembang di kota ini menarik untuk dicermati mengingat jaraknya jauh dari pusat kekuasaan Jawa sehingga membentuk karakter kelas menengah yang tersendiri.

Berdasarkan temuan Klinken, karakter kelas menengah yang berkembang di Kota Kupang sendiri merupakan kelas baru yang dihasilkan dari sebuah proses kolonialisasi walaupun interaksi di antara masyarakat sendiri bersifat egaliter sehingga memunculkan relasi kekuasaan yang dinamis. Entitas elite masyarakat yang sebelumnya adalah para *raja* kemudian diganti kedudukannya dengan misionaris, birokrasi, maupun juga militer. Dengan kata lain, kelas menengah yang berkembang di Kupang ini merupakan transformasi dari kelas aristokrat sebagai elite lama yang kemudian menjadi elite baru dalam rezim negara baru. Adanya transformasi tersebut mengindikasikan bahwa karakter sebagai kelas *controller* tersebut masih terjaga dalam elite tersebut.

Pergolakan yang terjadi di Jakarta mempunyai andil cukup kuat memengaruhi karakter kelas menengah yang berada di Kota Kupang. Hal itu bisa disimak dari serangkaian episode politik yang terjadi di Kupang merupakan respons terhadap apa yang terjadi di Pusat. Dalam hal ini, kontestasi kelas menengah Kupang sangat dipengaruhi berbagai macam elemen seperti halnya birokrasi (yang sebelumnya memiliki afiliasi dengan PNI), borjuasi, maupun juga golongan komunis. Namun, hal itu kemudian sirna dengan semakin menguatnya militer dalam tubuh politik Indonesia. Gerakan 30 September dan perkembangan setelahnya memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perubahan politik yang berkembang dan terjadi di Kupang. Peristiwa tersebut memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kelas menengah di Kupang

yang sebelumnya sangat atraktif dan politis menjadi apolitis. Hadirnya Orde Baru dengan pendekatan pembangunannya memberikan dampak signifikan terhadap munculnya kelas menengah baru di Kota Kupang. Namun yang disayangkan adalah munculnya pengaruh Jawanisasi di Kupang yang kemudian perlahan-lahan menggeser peran penduduk asli. Perkembangan terbaru memperlihatkan adanya stimulus terhadap ruang-ruang demokrasi lokal di Kupang semenjak masa reformasi yang memberikan dampak signifikan terhadap menggeliatnya kehidupan perekonomian maupun juga politik di Kupang, Kelas menengah pribumi secara perlahan mendapatkan tempatnya untuk menjadi pemain dominan dalam mengelola ekonomi dan politik dengan mengusung gagasan putra daerah. Kelas menengah di Kupang juga mengalami pengalaman dalam pembentukan ruang demokrasi lokal pasca penerapan otonomi daerah ketika mereka berupaya untuk menegaskan kembali peran mereka sebagai motor kehidupan politik di kota provinsi tersebut.

PENUTUP

Secara garis besar buku ini mengulas perkembangan gagasan *Middle Indonesia* dalam kasus kelas menengah Kupang. Perspektif Indonesia Menengah yang menjadi pendekatan dalam kajian ini secara komprehensif mampu menjadi kerangka untuk melihat peran “antara” (*in-between*) yang terdapat dalam kelas menengah Indonesia yang selama ini belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kasus Kota Kupang sebagai studi kasus pertumbuhan kelas menengah di kota-kota provinsi memperlihatkan adanya sisi transformasi dan dinamis kelompok masyarakat menengah ini yang berangkat dari masa feodal dan kemudian tampil sebagai motor perubahan ekonomi-politik.

Namun demikian, perspektif *Middle Indonesia* yang diangkat dalam kajian ini belum cukup untuk melihat dinamika kelas menengah pribumi dengan memperhatikan kehadiran warga pendatang yang juga memainkan peran yang tidak kecil. Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas mengingat pasca terbukanya ruang demokrasi lokal, muncul sentimen lokal yang signifikan tentang penguatan peran masyarakat pribumi.

Sementara itu, bagi kelompok masyarakat pendatang yang notabene sudah menetap karena kebijakan migrasi pemerintah tentu berupaya mempertahankan dominasinya dalam arena ekonomi-politik. Oleh karena itulah dalam riset yang mengangkat perspektif *Middle Indonesia* sebagai perspektif analisis, penting untuk disimak mengenai relasi tersebut dalam riset mendatang. Namun, setidaknya gagasan *Middle Indonesia* menjadi pendekatan alternatif penting dalam memahami perkembangan kelas menengah khususnya yang terjadi di level provinsi dan karenanya buku ini layak menjadi salah satu rujukan dalam kajian-kajian terhadap kelas menengah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiko, Kurosawa & William Bradley Horton. 2015. *Consuming Indonesia: Consumption in Indonesia in the Early 21st Century*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2012. "Gaya Hidup Suka Mengonsumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi." *Prisma*. 31(1): 14-28.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2015. "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Kelas Menengah Indonesia." *Sosioteknologi* 14, (2): 102-112.
- Van Klinken, Gerry dan Ward Berenschot. 2014. *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns*. Leiden: Brill.

